

STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAHAN WALIKOTA TEGAL DALAM PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19

Sri Sutjiatmi ^{1*}, Dimas Purbo Pambudi ², Erny Rosyanti ³, Vina Amelia ⁴, Akhmad
Habibullah ⁵

Universitas Pancasakti Tegal, Kota Tegal, Jawa Tengah, Indonesia.

*sutji.fisip@gmail.com

Abstract

This study focuses on government communication strategy of Mayor's Tegal city to mitigating covid-19 pandemic. This research was conducted to identify and describe the communication strategy that used Dedy Yon Supriyono to leads covid-19 pandemic mitigation. This research uses a qualitative approach with a case study methodology through in-depth interviews as the primary data collection method. The theory used in this study is communication strategy. The results of this study indicate that communication strategy of the Tegal Mayor's administration has been effective starting from the research, planning, implementation, evaluation, to reporting stages. All leading sectors have been maximal in coordinating in covid-19 pandemic mitigation based on Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 and supported with various media such as websites and instagram.

Keywords: *strategy, communication, government, covid-19 mitigation*

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada strategi komunikasi pemerintahan Walikota Tegal dalam menanggulangi pandemi covid-19. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan strategi komunikasi yang digunakan Dedy Yon Supriyono dalam memimpin penanggulangan pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi studi kasus melalui wawancara mendalam sebagai metode utama pengumpulan data. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori strategi komunikasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi pemerintahan Walikota Tegal telah efektif mulai dari tahap penelitian, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pelaporan. Seluruh *leading sector* telah maksimal dalam berkoordinasi dalam menanggulangi pandemi covid-19 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 dan ditunjang dengan penggunaan berbagai media seperti website dan instagram.

Kata kunci: strategi, komunikasi, pemerintahan, penanggulangan covid-19

PENDAHULUAN

Penanggulangan dampak pandemi *Corona Virus Disease-19 (COVID-19)* dalam tiga tahun terakhir menjadi prioritas utama di berbagai negara termasuk di Indonesia. Sejak merebak dari Wuhan, China virus ini berdampak kepada seluruh aktivitas manusia. Hingga akhirnya pada bulan Maret 2020, World Health Organization (WHO)

telah mendeklarasikan *COVID-19* sebagai pandemi yang mesti ditangani dengan tuntas dan serius (Sameni, 2020). Berbagai negara di dunia merespon penularan *covid-19* ini dengan beragam cara, misalnya negara Malaysia sebagaimana diungkapkan oleh (Azizan bin Abdul Rahman & Nurwati Ashikkin binti Ahmad Zaluki, 2020) bahwa ada inisiatif pencegahan penularan *covid-19*

dengan langkah membentuk Perintah Kawalan Pegerakan (PKP). Pada perkembangannya, hampir setiap hari informasi *covid-19* mengudara di berbagai media televisi, media sosial dan sebagainya.

Sebagai informasi, *Pneumonia Coronavirus Disease 2019* atau *COVID-19* adalah penyakit peradangan paru yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2). Gejala klinis yang muncul beragam, mulai dari seperti gejala flu biasa (batuk, pilek, nyeri tenggorok, nyeri otot, nyeri kepala) sampai yang berkomplikasi berat (pneumonia atau sepsis) bahkan menyebabkan kematian (D. K. K. Tegal, 2020). Data dari WHO menyebutkan pada Januari tahun 2020, virus *covid-19* telah menginfeksi lebih dari 2.245.872 jiwa di seluruh dunia, lebih dari 152.000 orang telah terkonfirmasi meninggal dunia karena virus ini (Agustino, 2020). Hingga bulan April tahun 2022 terdapat total terkonfirmasi positif *covid-19* sejumlah 490.853.129 di seluruh dunia (World Health Organization, 2022), dan di Indonesia terdapat 155.421 kasus meninggal karena *covid-19* (Kesehatan, 2022).

Covid-19 telah mengakibatkan bahaya untuk kesehatan manusia dan berdampak pada aktivitas perekonomian, pendidikan sejak awal tahun 2020. Hingga akhirnya, pemerintah memutuskan untuk menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna memutus mata rantai penyebaran virus corona. Kebijakan PSBB ini dirasa tepat karena menutup berbagai fasilitas umum, namun sektor vital tetap beroperasi sehingga dianggap bisa mencegah penularan namun daya beli masyarakat terjaga (Rindam Nasrudin, 2020). Walaupun kebijakan PSBB diambil

oleh Pemerintah Pusat, tetapi sangat perlu merangkul Pemda, karena Pemda yang memahami situasi lingkungan politik, sosial, dan ekonomi yang dapat memengaruhi kebijakan (Purwanto, 2012). Pada posisi ini, dalam (Nurfurqon, 2020) dijelaskan bahwa Pemda tidak bisa semaunya sendiri bergerak, harus pada landasan hukum dan mengikuti langkah administratif yang benar. Sehingga, dapat tercipta keharmonisan dalam kerjasama antara Pempus dan Pemda.

Berbagai urgensi dalam penanggulangan *covid-19* terjadi termasuk di Kota Tegal, mulai dari pentingnya menerapkan protokol kesehatan, percepatan vaksinasi *covid-19*, hingga kebijakan *lockdown* lokal. Kondisi pandemi di Kota Tegal awalnya terkendali, namun seiring mewabahnya *covid-19*, hingga bulan April tahun 2022 tercatat kasus positif *covid* sejumlah 7184, dan lebih dari 300 orang diantaranya meninggal (D. K. K. Tegal, 2020). Ada banyak hal yang dipertimbangkan Walikota hingga memutuskan untuk *lockdown* lokal, salah satu pertimbangannya adalah lebih memprioritaskan keselamatan kesehatan warganya, atau mencoba mempertahankan aktivitas perekonomian yang berarti tidak ada pengurangan mobilitas warganya akhirnya dapat menjadi kerumunan seperti yang disampaikan Sekretaris Daerah Kota Tegal saat wawancara. Hingga pada akhirnya, berdasarkan hasil rapat Satgas Penanganan *Covid-19* Kota Tegal bersama Forkopimda menetapkan bahwa Kota Tegal masuk zona merah pada awal tahun 2020. Ketetapan tersebut membuat jalan akses masuk Kota Tegal ditutup termasuk di lingkungan perkampungan/ gang perumahan juga di MBC beton bukan lagi *water barrier* (Safutra, 2020).



Gambar 1. Suasana Kegiatan Isolasi Kota Tegal
Sumber: Dokumen penulis, 2021

Pada gambar 1 menunjukkan suasana kegiatan isolasi wilayah/ lock down lokal Kota Tegal. Berdasarkan pengalaman dalam penanggulangan *covid-19*, memberikan pelajaran berharga bagi Walikota Tegal agar memiliki strategi komunikasi pemerintahan yang akurat dan efektif. Hal tersebut penting untuk menjamin optimalnya koordinasi dengan seluruh *leading sector* dalam penanggulangan *covid-19*. Komunikasi pemerintahan dalam (Hasan, 2005) yaitu penyampaian ide, program dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara bahkan daerah. Pada komunikasi pemerintahan, yang bertindak sebagai komunikator adalah pemerintah, karena dapat menanamkan pengaruhnya pada masyarakat sehingga dapat menerima dan melaksanakan ide serta program pemerintah (Khairifa, 2018). Sebagai langkah nyata mewujudkan komunikasi pemerintahan yang efektif maka Walikota Tegal membutuhkan strategi untuk berkomunikasi.

Adanya strategi komunikasi yang efektif sangat diperlukan. Sebagaimana (Cangara, 2013) menyebutkan bahwa strategi komunikasi adalah hasil perpaduan dari berbagai elemen komunikasi meliputi komunikator, pesan, media, komunikan hingga efek demi maksimalnya tujuan komunikasi. Menurut Cangara, penentuan strategi menjadi langkah yang penting

sehingga membutuhkan penyelesaian yang cermat untuk perencanaan komunikasi. Menurut Effendy (Lianjani, 2018) strategi komunikasi adalah perpaduan dari *communication planning* serta *communications management* agar target tercapai. Penentuan strategi menjadi langkah yang penting sehingga membutuhkan penyelesaian secara hati-hati dalam perencanaan komunikasi (Cangara, 2013). Dalam penelitian ini yang menjadi fokus pembahasan adalah strategi komunikasi pemerintahan dari Walikota Tegal dalam kapasitasnya sebagai pemimpin daerah sekaligus bertindak sebagai Kepala Tim Satgas Penanggulangan Pandemi *Covid-19* (Kasatgas) di Kota Tegal.

Menurut Wayne Pace, Brent D, Peterson, serta Dallas Burnett, dalam (Lianjani, 2018) menyatakan bahwa strategi komunikasi bertujuan *to secure understanding* dan *to establish acceptance*, hingga *to motivate action*. Strategi komunikasi erat kaitannya dengan berbagai cara untuk mencapai efektivitas dan efisiensi komunikasi. Komunikasi sendiri diartikan sebagai interaksi yang dilakukan untuk menyampaikan pesan dari pembicara kepada pendengar atau sebaliknya (Juliantari, 2019). Maka dari itu, penting untuk dipahami bahwa antara komunikator dengan komunikan harus saling memahami inti dari isi pesan dari kegiatan komunikasi dan memastikan penggunaan media yang tepat untuk berkomunikasi.

Penetapan strategi untuk perencanaan komunikasi tidak luput dari adanya elemen komunikasi. Komunikasi dapat menjawab pertanyaan berupa *who says what in which channel to whom with what effect* sebagaimana diungkapkan Lasswell (Wijaya, 2015). Maka dari itu, perencanaan

komunikasi menerapkan strategi sebagai berikut (Wijaya, 2015).

Pertama, memastikan ada komunikator. Peran komunikator sangat penting sebagai pelaku utama dalam kegiatan komunikasi. Komunikator memiliki syarat yang harus dimiliki seperti kredibilitas, kekuatan, dan daya tarik.

Kedua, menentukan target sasaran/khalayak. Dalam hal ini, kegiatan komunikasi memahami masyarakat atau target sasaran adalah hal yang penting.

Ketiga, merumuskan pesan. Pesan yakni segala sesuatu yang disampaikan berupa bentuk simbol serta tersampaikan oleh komunikator. Adapun 3 sifat pesan, yakni informatif, persuasif dan edukatif. Pesan informatif berarti sekadar ingin diketahui masyarakat, sedangkan persuasif jika pesan tersebut ingin mengajak/memengaruhi publik. Pesan edukatif memiliki unsur kognitif, afektif dan psikomotorik.

Keempat, menentukan saluran serta media komunikasi. Media harus memerhatikan karakter dan isi yang disampaikan ke khalayak dan pesan yang disalurkan kepada seluruh masyarakat dapat dijangkau via media massa.

Kelima, efek/pengaruh komunikasi. Tujuan seluruh kegiatan komunikasi yang dilaksanakan adalah memberikan pengaruh kepada khalayak ke dalam pola perubahan pada pengetahuan, sikap serta perilaku.

Tahapan perencanaan komunikasi sebagaimana disampaikan oleh (Cangara, 2013) memiliki lima tahapan yakni penelitian, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan. Penelitian (*research*) bermaksud untuk memahami permasalahan yang menimpa suatu lembaga. Permasalahan dapat berupa wabah penyakit, kerugian perusahaan, dan sebagainya.

Tahapan ini juga berarti untuk menemukan/mencari fakta yang digunakan untuk menetapkan rumusan dalam pembuatan strategi komunikasi untuk lembaga/organisasi agar tujuannya dapat terealisasi dengan efektif.

Plan (perencanaan) yaitu respon yang diterima setelah didapatkan hasil penelitian, perencanaan komunikasi ini membutuhkan strategi terkait penetapan komunikator, pesan, media, sasaran, hingga efek. Pelaksanaan (*execute*) tindakan dalam menerapkan perencanaan komunikasi yang ditetapkan. Pelaksanaan contohnya seperti tanya jawab di radio, mendirikan baliho/spanduk, stiker, pada target/ sasaran. Evaluasi (*measure*) untuk mengetahui hasil akhir dari program yang dilakukan. Terakhir adalah pelaporan (*report*), laporan lebih baik dibuat tertulis untuk disampaikan. Jika program tersebut berhasil maka bisa menjadi pedoman untuk program selanjutnya, sebaliknya jika kurang sempurna program tersebut dapat direvisi (Meitibellina & Hariyanti, 2020).

Penelitian tentang komunikasi pemerintahan, telah banyak dilakukan diantaranya adalah pertama, strategi komunikasi menuju *smart city* di Kabupaten Blora oleh (Meitibellina & Hariyanti, 2020) menunjukkan ada 6 dimensi konsep *smart city* beserta beberapa aktivitas di dalamnya yang digunakan di Kabupaten Blora yaitu *smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart society* dan *smart environment*. Pada penelitian kedua (Lianjani, 2018) strategi komunikasi pemerintahan untuk menyosialisasikan program *smart city* menunjukkan hasil penelitian bahwa sosialisasi telah dilakukan melalui 5 tahapan (penelitian, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan).

Ketiga, penelitian yang berjudul *Model Komunikasi Pemerintahan Kota Tanjung Pinang Dalam Pengembangan Wisata Pulau Penyengat Kepulauan Riau* oleh (Ismandianto, Syafri Harto, 2019) dengan hasil penelitian menunjukkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata Pulau Penyengat belum maksimal dan berdasarkan analisis dikembangkan komunikasi pemerintahan merupakan faktor penting dalam pengembangan desa wisata pulau penyengat.

Dari berbagai penelitian/ kajian yang telah ada, penelitian ini menawarkan *novelty* (kebaharuan) untuk mengkaji lebih mendalam mengenai strategi komunikasi pemerintahan yang diimplementasikan oleh Walikota Tegal Dedy Yon Supriyono selaku Kepala Satuan Tugas (KASATGAS) penanggulangan pandemi *covid-19* di Kota Tegal. Penelitian ini akan mengeksplorasi strategi komunikasi formal maupun informal yang dijalankan oleh Walikota Tegal dalam penanggulangan pandemi covid-19.

METODOLOGI PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengangkat studi kasus agar dapat memperdalam pembahasan tentang bagaimana penerapan strategi komunikasi pemerintahan Walikota Tegal serta menjabarkan kondisi suatu objek yang berhubungan dengan penanggulangan *covid-19* di Kota Tegal. Selama dalam penelitian, setiap kegiatan diamati, dicatat dan wawancara direkam dengan *recorder* agar terdokumentasikan. Informan dalam penelitian ini adalah pihak yang termasuk dalam *leading sector* penanggulangan *covid-19* di Kota Tegal.

Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Daftar Informan Penelitian

	Nama Informan	Instansi/Jabatan	Waktu Wawancara
1	Dr. Ir. Johardi	Sekretaris Daerah Kota Tegal	30 Maret 2022
2	dr. Wikanti Devi	Kasie Penanggulangan & Pencegahan Penyakit, Dinkes Kota Tegal	12 April 2022
3	Drs. Ahmad Rofi'i	Kabid Lalu Lintas, Dishub Kota Tegal	5 April 2022
4	Saefudin Helmi	PPNS, Kasie Opsdal, Satpol PP Kota Tegal	4 April 2022
5	Jenal	Anggota Satpol PP	11 April 2022
6	Dimas Dwi	Suporting Staff, Dishub Tegal	4 April 2022
7	Tribowo	BPBD Kota Tegal	18 April 2022

Pengumpulan data primer berupa wawancara dilakukan untuk mendapat berbagai informasi terkait berjalannya strategi komunikasi Walikota Tegal dalam penanggulangan pandemi *covid-19* Kota Tegal. Selain itu, peneliti membutuhkan data lain/ data sekunder sebagai sumber tambahan berupa informasi dari media online. Penulis menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman. Terdapat 3 bagian, yaitu (1) reduksi data (2) penyajian data serta (3) verifikasi/penarikan kesimpulan. Menurut Miles dan Huberman (Idrus, 2009), tiga kegiatan tersebut dilakukan saat mengumpulkan data dan proses ini juga disebut sebagai siklus dan interaktif. Jadi, peneliti bergerak dalam tiga tahap, yakni pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan verifikasi/ kesimpulan. Maka dari itu, bisa dikatakan bahwa analisis yang

digunakan akan terus berulang dan berlanjut hingga berakhirnya penulisan

Kebijakan Komunikasi Pemerintahan Walikota Tegal dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19

Dedy Yon Supriyono adalah Walikota Tegal, beliau dikenal sebagai sosok yang inovatif dan komunikatif dalam menjalankan pemerintahannya. Berbagai prestasi selama memimpin Kota Tegal telah ditorehkan. Prestasi itu tak lepas dari keberhasilannya berkoordinasi dengan jajarannya. Hal tersebut ditegaskan dari pernyataan informan “*Gaya berkomunikasi Pak Wali selama ini beliau orangnya santun, terbuka, instruksinya mudah dipahami dan biasanya kalau minta pengawalan tidak begitu ketat/ kaku, lebih fleksibel kalau pak Wali sekarang*” (ket. Jenal-Satpol PP Kota Tegal). Sebagai pejabat eksekutif, Dedy Yon memimpin Kota Tegal dengan penuh strategi termasuk menetapkan strategi komunikasi pemerintahan dalam menanggulangi pandemi covid-19 di Kota Tegal.

Terkait strategi komunikasi, menurut (Cangara, 2013), sebelum mengimplementasikan suatu kegiatan, terdapat kebijakan yang digunakan sebagai dasar perencanaan. Kebijakan adalah pedoman, namun perencanaan dalam realisasinya didasarkan atas petunjuk yang ditetapkan sehingga perencanaan harus berdasar pada kebijakan. Dalam temuan penelitian ini berikut adalah dasar peraturan penanggulangan covid-19 di Kota Tegal:

Tabel 2 Dasar Hukum Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kota Tegal

No	Nama Peraturan	Keterangan
1	Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pencegahan	Berakhir: 23 Desember 2020

Penularan Covid-19 di Kota Tegal.

- 2 **Dasar Peraturan Utama:** Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 di Kota Tegal (Perda 10/2020).
- Diundangkan pada 23 Desember 2020, **hingga sekarang.**

Sumber: Bagian Hukum, Setda Kota Tegal

Perda 10/2020 di atas menjadi bukti bahwa ada inisiatif dari Walikota Tegal untuk mengundang aturan tertinggi di tingkat daerah. Perda 10/2020 menjadi strategi berkomunikasi secara tertulis dan formal dari Walikota Tegal kepada seluruh OPD di Pemkot Tegal hingga kepada masyarakat. Dasar hukum Perda ini menjadikan seluruh aktivitas penanggulangan covid-19 memiliki *legal standing* dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dapat memberikan kepastian hukum, memuat sanksi yang jelas dan menumbuhkan kesadaran agar terlibat aktif dalam penanggulangan pandemi covid-19.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Komunikasi Pemerintahan Walikota Tegal dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19

Subbab ini menjabarkan elemen komunikasi pada strategi komunikasi pemerintahan Walikota Tegal yang terbagi dalam beberapa tahapan, yakni penelitian, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Pertama, tahap penelitian. Menetapkan strategi pada tahapan penelitian adalah dengan memahami permasalahan yang pada awal pandemi. Dari berbagai masalah, maka “*Pak Wali di awal pandemi mempertimbangkan apa yang harus diselamatkan lebih dahulu, karena yang terpenting adalah kesehatan masyarakat, maka kita putuskan untuk lock down lokal*”

agar warga terlindungi” (ket. Sekda Kota Tegal). Lockdwon lokal akan mengurangi aktivitas warga di tempat non prioritas. Upaya penanggulangan pandemi *covid-19* juga dituangkan dalam Perda 10/2020 dengan tujuan untuk melaksanakan pencegahan penularan *Covid-19* guna melindungi masyarakat, mengantisipasi eskalasi penularan, memperkuat upaya penanganan akibat *covid-19*, serta mendisiplinkan penerapan protokol kesehatan (W. Tegal, 2020)

Tahap penelitian menjadi strategi pertama dari Walikota untuk mengetahui situasi pandemi dan memperoleh data *terupdate*. Tahap ini direalisasikan dengan berkomunikasi secara lisan dengan berbagai pihak melalui rapat koordinasi (rakor). Rakor diadakan seminggu sekali bertempat di Polresta Tegal/ di ruang Adipura Balaikota Tegal. Rapat koordinasi ini dihadiri dari berbagai unsur seperti Walikota, Sekda, dari unsur militer (Kapolres, Danrem, Danramil) dan perwakilan instansi pemerintahan (Dinkes, BPBD, dan sebagainya). Pembahasan dalam rakor juga diarahkan untuk mempercepat capaian vaksinasi *covid-19*. Sementara untuk data rujukan berasal dari Kementerian Kesehatan, Komite Percepatan Penanggulangan *covid-19* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPPCPEN), serta data se-Jawa Tengah dari website corona.jatengprov.go.id (ket. wawancara: dr. Wikanti Devi). Hal ini berarti bahwa data yang digunakan kredibel, terpadu dan dinamis. Data yang diperoleh juga bisa digunakan untuk mengantisipasi lonjakan kasus harian di Kota Tegal.



Gambar 2. Rapat Kordinasi Penanggulangan Covid-19.

Sumber: Dokumentasi Penulis

Gambar 2 adalah suasana giat rapat koordinasi penanggulangan *covid-19* yang melibatkan Walikota beserta seluruh jajarannya, gambar bersumber dari salah satu anggota Satpol PP Kota Tegal. Rapat koordinasi merupakan strategi yang efektif untuk saling menyampaikan informasi dan berinteraksi secara lisan. Prinsipnya, komunikasi dapat efektif ketika melibatkan komunikator dan komunikan secara langsung tanpa media elektronik sehingga isi pesan dapat dipahami & terhindar dari kesalahpahaman.

Kedua, tahap perencanaan. Perencanaan adalah perancangan metode-metode ke depan dalam menentukan dan merancang strategi agar suatu tujuan strategis dapat tercapai Hariadi (Lianjani, 2018). Perencanaan merupakan aksi yang akan digunakan setelah mendapatkan hasil penelitian (Cangara, 2013). Tahap perencanaan dalam penanggulangan *covid-19* di Kota Tegal membutuhkan strategi untuk menetapkan komunikator, isi pesan, media, sasaran, serta efek yang diinginkan dari berjalannya komunikasi, berikut uraiannya:

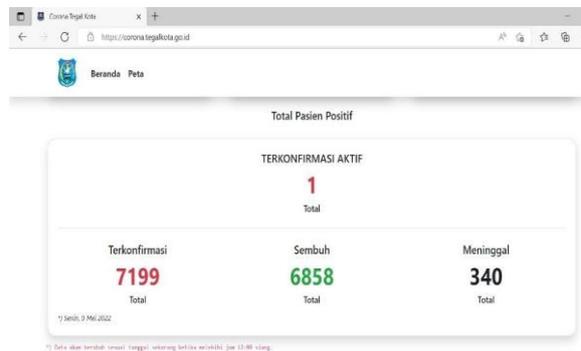
Pertama, komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan dalam aktivitas komunikasi. Pihak yang menjadi komunikator utama dalam penanggulangan *covid-19* adalah Walikota Tegal Dedy Yon Supriyono selaku KASATGAS Penanggulangan *Covid-19* Kota Tegal. Tak hanya Walikota, komunikator lainnya adalah Satpol PP, kepala OPD lingkungan Pemkot Tegal yang

terlibat untuk menyampaikan pesan penanggulangan covid-19 kepada masyarakat sesuai dengan Perda 10/2020.

Kedua, pesan. Pesan adalah segala sesuatu yang disampaikan komunikator dalam bentuk simbol, suara, maupun tertulis) sehingga dapat diterima oleh komunikan. Sebagaimana keterangan bapak Tribowo, *“pesan utama dari pak Walikota, sebisa mungkin mempercepat penanganan covid-19, semua bekerja keras menurunkan kasus covid-19 di Kota Tegal, kemudian Walikota seluruh leading sector agar selalu menyampaikan himbauan untuk mencegah penularan covid-19, melindungi masyarakat Tegal, mengantisipasi kenaikan penyebaran covid-19.* Isi pesan yang disampaikan Walikota kepada *leading sector* dan masyarakat ditujukan semua pihak dapat bahu membahu melakukan aksi nyata penanggulangan pandemi covid-19. Aksi nyata dapat dilakukan dengan memakai masker, menghindari kerumunan, menjaga jarak interaksi, dan sebagainya. Isi pesan dalam penanggulangan covid-19 kepada masyarakat juga menyesuaikan jenis media yang digunakan. Media di Pemkot Tegal yang mudah dijangkau adalah media online seperti website dan instagram.

Sifat pesan dalam berbagai media online haruslah informatif. Informatif ini berarti sesuatu yang didapat dari komunikasi dapat menjadi pengetahuan bagi seseorang. Salah satu informasi yang dipublikasikan dalam penanggulangan pandemi di Tegal adalah informasi tentang pentingnya vaksin, mengajak vaksin, serta upaya melawan hoax tentang bahaya vaksin kepada masyarakat melalui Radio Sebayu FM agar masyarakat partisipatif dalam penanggulangan covid-19. Isi pesan juga bersifat faktual, baru serta umum berupa publikasi. Selama ini pesan juga melalui Satpol PP, melalui banner, tulisan pada stiker di rumah warga sehingga pesan dapat dipahami, diingat, dan dipatuhi oleh masyarakat.

Ketiga, media. Media merupakan instrument penting dalam proses berkomunikasi (Lianjani, 2018). Sebagai strategi komunikasi, Walikota Tegal menggunakan media website, instagram, radio, hingga banner dan stiker. Media website dapat diakses pada laman *corona.tegalkota.go.id*, akun instagram *@dinkeskotategal*. Kedua media tersebut berisi informasi penting terkait penanggulangan covid-19. Berikut tampilannya:



Gambar 3. Webiste Kota Tegal



Gambar 4. Akun Instagram Dinkes Kota Tegal

Gambar 3 dan 4 adalah tampilan media yang digunakan untuk menyajikan informasi dan memungkinkan terjadinya interaksi dengan warga kota Tegal dalam rangka penanggulangan pandemic covid-19, bersumber dari website dan akun Instagram resmi yang dikelola Pemkot Tegal. Selain website dan Instagram, media lainnya adalah Radio LPPL Sebayu FM Tegal 94YA, dengan visi sebagai wahana pencerahan dan sentra berita lokal terpercaya, radio Sebayu telah menjadi salah satu andalan Pemkot Tegal sebagai sumber informasi

Keempat, sasaran. Sasaran adalah pihak yang menerima pesan/ informasi dalam proses berkomunikasi (komunikasikan). Sasaran utama dalam strategi komunikasi pemerintahan Walikota adalah warga/ masyarakat Kota Tegal. Berdasarkan sasaran tersebut, maka 287.959 orang (Dukcapil, 2021) harus terjangkau informasi dan berbagai program penanggulangan *covid-19*.

Kelima, efek. Efek adalah keputusan final dari kegiatan komunikasi untuk memengaruhi khalayak, bisa dalam bentuk perubahan pada pengetahuan, sikap maupun perilaku. Strategi komunikasi dari Walikota Tegal telah berhasil menciptakan efek kepatuhan pada warga/ masyarakat Kota Tegal dengan berbagai instrument mulai dari Peraturan Daerah, penggunaan berbagai media sosialisasi dan sebagainya. Kepatuhan tersebut direalisasikan dengan penerapan protokol kesehatan (prokes) seperti pada berbagai sarana publik (mall, bank, dan rumah sakit). Prokes di mall misalnya, diterapkan dengan disediakan alat cuci tangan, pengukur suhu badan dan terpasang banner/ spanduk bertuliskan “area wajib masker”. Berbagai realisasi di atas mencerminkan adanya kepatuhan masyarakat yang aktif terlibat dalam penanggulangan *covid-19*. Sementara itu, data dari <https://ppkm.satpolpp.jatengprov.go.id> menunjukkan bahwa dari bulan ke bulan jumlah pelanggaran terhadap prokes di Kota Tegal semakin menurun. Menurunnya pelanggaran, tak lepas dari ketegasan Satpol PP dalam menetapkan sanksi pada pelanggar tipiring (personal maupun sarana publik).

Efek kepatuhan lainnya dapat terlihat dari capaian vaksinasi *covid-19*. Hingga bulan April tahun 2022, vaksinasi dosis 1 dan 2 telah mencapai 100% (ket. dr. Wikanti). Keberhasilan vaksinasi tersebut adalah hasil kerjasama dari Satgas di semua tingkatan, pelibatan relawan tenaga kesehatan yang dikoordinatori oleh Dinkes Kota Tegal bagian SDM Kesehatan (ket. dr. Wikanti). Seluruhnya terlibat untuk mengedukasi dan

mengajak masyarakat untuk vaksin. Sehingga masyarakat Kota Tegal mau untuk divaksin yang dalam jangka panjang akan menunjang imunitas, dan membentuk *herd immunity* (kekebalan kelompok).

Tahap ketiga pelaksanaan. Pelaksanaan strategi komunikasi Walikota Tegal telah terealisasi dengan baik. Hal tersebut terlihat dari optimalisasi penegakan Perda dan berbagai realisasi kegiatan dalam penanggulangan *covid-19*. Walikota beserta seluruh jajaran Pemkot Tegal telah melaksanakan penanggulangan *covid-19* sejak awal tahun 2020 dengan berbagai langkah. Seluruh langkah telah dikomunikasikan secara akurat kepada *leading sector* penanggulangan *covid-19*. Ketika Walikota melibatkan *leading sector* juga disertai dengan formalitas yang kuat yakni dengan adanya surat resmi (seperti undangan rakor, permintaan pelibatan personil Dishub untuk vaksinasi). *Ketika Pa Wali melibatkan Dishub kita menerima surat resminya, dan kami selalu siap menjalankan arahan Walikota, saat itu Dishub terlibat dalam penutupan jalan, percepatan vaksinasi di tiap kelurahan, pegawai kami pun aktif di lapangan,* tutur Rofi’i Kabid Lalu Lintas Dishub Kota Tegal.

Langkah pelaksanaan lainnya adalah mengoptimalkan tegaknya Perda No.10/2020. Penegakan Perda ini secara konsisten dimotori oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menegakkan peraturan daerah dan peraturan Walikota, menyelenggarakan dan memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menyelenggarakan penyuluhan dan kesamaptaaan (W. Tegal, 2008). Tugas tersebut direalisasikan dengan berbagai giat, berdasarkan keterangan informan bahwa dalam upaya penanggulangan *covid-19*, Satpol PP sebagai penegak Perda melakukan kegiatan rutin operasi yustisi, operasi prokes bahkan pada malam hari guna memastikan tidak ada pelanggaran prokes di berbagai titik

keramaian seperti di pasar, alun-alun dan sebagainya (ket. bapak Helmi, PPNS Satpol PP Kota Tegal). Dengan demikian, adanya Perda tersebut menjadi strategi untuk menginformasikan isi kebijakan, menjadi upaya preventif penuluran *covid-19* dan pelanggaran prokes.

Tindak lanjut dari pelanggaran prokes adalah sidang tindak pidana ringan (tipiring) yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri, Kejaksaan, Polres, Kodim, Pangkalan AL, Subdenpom, Denpomal, Satreskrim Polres Tegal Kota (Praja, 2022) kepada para pelanggar protokol kesehatan baik perorangan maupun tempat usaha sesuai Perda No.10/2020. Adanya sidang tipiring berupa sanksi administratif ditujukan agar seluruh warga Tegal memiliki kesadaran untuk menjalankan prokes sehingga penyebaran *covid-19* dapat diminimalisir. Konsistennya penegakan aturan dalam penanggulangan pandemi, telah membuahkan hasil maksimal bagi Kota Tegal. Adanya aturan yang sah dan *legitimated* menciptakan kepastian hukum di masyarakat. Tak hanya tentang aturan, pandemi *covid-19* membutuhkan *extraordinary efforts* mengingat statusnya sebagai bencana non alam, sehingga peran BPBD dibutuhkan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD Kota Tegal) telah berperan dalam penanggulangan pandemi. Sebagaimana disampaikan oleh bapak Tribowo bahwa *BPBD berperan untuk membackup tugas dari Dinkes, beberapa hal yang dilakukan oleh kami seperti mendirikan tenda darurat untuk satgas covid di masing-masing kecamatan/ posko, mengerahkan tenaga untuk melakukan penyemprotan disinfektan ke rumah-rumah warga, membantu mengevakuasi pasien positif covid ke rumah sakit, bahkan hingga membantu memakamkan pasien dengan protokol pemakaman jenazah pasien positif covid-19 oleh tim 9 atau tutup bumi*. Berbagai hal tersebut dilakukan oleh BPBD untuk

mendukung keberhasilan pelaksanaan penanggulangan pandemi di Kota Tegal.

Terakhir, pelaksanaan dari strategi komunikasi pemerintahan Walikota Tegal dalam penanggulangan covid-19 adalah berhasilnya akselerasi vaksinasi. Sebagai terobosan, Pemkot Tegal di tahun 2021 merealisasikan adanya 1.000 gerai vaksinasi untuk mencapai 90% target vaksinasi. Gerai vaksinasi itu dibuka sejak 1 Agustus hingga akhir Oktober 2021 dengan tujuan dalam waktu 3 bulan, 90% dari 221.000 warga Tegal sudah mendapat vaksinasi (Setiadi, 2021). Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal, Ibu Prima mengatakan, untuk dosis pertama, vaksinasi sudah mencapai 120% dari sasaran sekitar 213.046 jiwa. Kemudian capaian vaksinasi dosis kedua sudah 91 persen, vaksinasi dosis ke-3 hingga Januari baru mencapai 4,5% (Abduh, 2022). Informasi tentang adanya gerai vaksinasi di atas juga sampai kepada warga Brebes, Pemasang dan Kab. Tegal karena sosialisasinya menggunakan papan reklame di jalan protokol sehingga menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Tahap keempat, evaluasi. Berjalannya koordinasi pada semua *leading sector* penanggulangan *covid-19* sudah maksimal. Namun, berbagai kekurangan tetap terjadi sehingga dalam membutuhkan evaluasi yang rutin. Evaluasi rutin dijalankan dengan adanya koordinasi antara Walikota dan Forkompimda, salah satunya evaluasi pada 18 Mei tahun 2021 di Adipura Balaikota Tegal. Evaluasi itu menyoroiti sektor pariwisata yang masih belum menerapkan protokol kesehatan. Dalam rapat evaluasi ketika itu, Kapolresta AKBP Rita menyampaikan bahwa perlu adanya peran serta dari pengelola wisata untuk menerapkan prokes utamanya adalah mewajibkan pengunjung memakai masker, dan harus menyediakan perlengkapan protokol kesehatan seperti menyediakan masker, tempat cuci tangan, *hand sanitizer* (Fajar Bahrudin Achmad, 2021).

Tahap kelima pelaporan. Pelaporan terkait hasil evaluasi kinerja seluruh *leading sector* penanggulangan *covid-19* selama ini diketahui oleh Walikota Tegal melalui rapat koordinasi. Salah contoh rapat koordinasi yang dipimpin oleh Walikota Dedy Yon terselenggara pada hari Senin 14 Juni 2021 yang membahas tentang evaluasi penanggulangan *covid-19* bertempat di Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Tegal. Sebagai mana dikutip dari *Tribun Pantura.com* bahwa Pemerintah Kota Tegal bersiap dengan rencana kontijensi apabila terjadi peningkatan Bed Occupancy Rate (BOR). Hal tersebut seiring terjadinya peningkatan jumlah kasus aktif *covid-19* di beberapa daerah di Jawa Tengah. Upaya tersebut menurut Dedy Yon untuk memastikan upaya pencegahan dan penanggulangan *covid-19* dapat dilaksanakan dalam kondisi darurat (Fajar Bachruddin Achmad, 2021).

Terkait pelaporan, seharusnya seluruh informasi ditujukan kepada pihak yang kewenangannya lebih tinggi seperti Gubernur. Agar informasi diketahui berbagai pihak maka koordinasi harus vertikal dari bawah menuju atas. Pelaporan yang patut dilakukan berasal dari Walikota Tegal kepada Gubernur Jateng, setidaknya Walikota melaporkan berbagai proses penanggulangan *covid-19*, capaian yang telah dilakukan dan bila perlu Gubernur mengapresiasi Kota Tegal ketika berhasil dalam menekan penyebaran *covid-19* dan akselerasi vaksinasi. Dalam mengapresiasi kinerja ini, hal yang perlu dikesampingkan adalah sentimen kepartaian, jangan sampai karena berbeda afiliasi partai politiknya menjadi penghalang bagi sinergi dalam berkoordinasi dan enggan untuk mengapresiasi.

Pembahasan

Kemampuan Komunikator

Walikota Tegal Dedy Yon telah melakukan tugasnya sebagai komunikator

secara baik. Beliau berhasil mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber untuk mentransfer isi pesan komunikasi dalam penanggulangan pandemic *covid-19* kepada target (komunikasikan). Berbekal peraturan (Perda) yang digunakan, peran komunikator telah berhasil menyampaikan berbagai hal substantif secara tertulis, lisan maupun melalui perantara media. Disahkannya Perda menunjukkan keseriusan Dedy Yon untuk menjadikan penanganan pandemi *covid-19* sebagai prioritas. Maka dari itu, kemampuan komunikasi yang baik mutlak diperlukan untuk menyosialisasikan isi pesan, gagasan dan sebagainya. (Karlina Siregar & Djuwita, 2020) Keahlian berkomunikasi merupakan kemampuan individu untuk berkomunikasi seperti kemampuan membaca, menulis, berbicara, mendengarkan dan lain-lain. Dedy Yon telah mampu menggerakkan berbagai elemen untuk bergerak bersama menanggulangi pandemi *covid-19* di Kota Tegal, mulai dari Satpol PP, jajaran SKPD, dan sebagainya. Posisinya sebagai komunikator sebagai penentu kebijakan yang dilaksanakan. Pihak komunikasikan pun sangat baik dalam merespon pesan yang disampaikan terbukti semakin sadarnya masyarakat menaati prokes dan sadar vaksinasi. Ada hal unik juga yang terjadi ketika Dedy Yon dan pejabat Pemkot Tegal menyosialisasikan vaksinasi bagi anak usia sekolah dasar, mereka hadir dengan menggunakan pakaian siswa SD yang mengundang perhatian khalayak dan menyampaikan isi pesan yang terkandung dibalik tindakan mereka, hal tersebut membuktikan komunikator yang telah berhasil.

Media/ Saluran (Channel)

Pemilihan media yang tepat juga menjadi kunci kesuksesan penanggulangan pandemi *covid-19*. Keberadaan website dan media sosial menjadi sarana penting untuk mentransfer pesan. Berbagai informasi dapat dimuat melalui media sehingga masyarakat bebas memilih informasi apa saja yang akan

diproses sebagai pengetahuan khususnya mengenai penanggulangan pandemi covid-19.

Adanya website dan akun instagram memberi kemudahan pada masyarakat. Akses informasinya terbuka dapat diakses dimanapun dan kapanpun atau dengan kata lain 'informasi dalam genggaman'. Berbagai informasi edukatif seperti update kasus, data rumah sakit rujukan covid & penerapan prokes selama pandemi tersaji rapi pada kedua media. Pada akun instagram @dinkeskotategal misalnya, terdapat kurang lebih 70 kali postingan terkait berbagai informasi penanggulangan pandemi, selain itu terdapat video cara menjaga diri dan keluarga selama masa pandemi yang telah dilihat lebih dari 320 kali tayangan. Hal tersebut menandakan akun tersebut mendapatkan respon positif dari masyarakat karena kontennya menarik, aksesibilitasnya mudah dan *update* termasuk hingga September 2022 tentang informasi vaksinasi. Penggunaan kedua media di atas membuktikan bahwa penanggulangan pandemi dikemas melibatkan teknologi yang terdigitalisasi/ secara online dengan sekali klik. Media lainnya adalah melalui radio, beragam pesan yang disampaikan dapat memenuhi ruang dengar masyarakat Kota Tegal sehingga bisa jelas dipahami. Porsi siaran juga mendukung dalam penanggulangan *covid-19*, persentase siaran berita dan informasi adalah 35%, dengan demikian masyarakat dapat lebih sering mendengarkan dan memahami isi informasi. Termasuk berbagai informasi tentang penanggulangan covid seperti hoax bahaya vaksinasi, dan sebagainya. Media radio dapat efektif karena pesan yang disampaikan dapat didengarkan berulang kali sehingga efek kepatuhan dapat terjadi. Media yang juga tak kalah pentingnya adalah banner/spanduk/baliho yang banyak terpasang di berbagai titik ruang publik seperti di pinggir jalan, mall, bank, restoran dan sebagainya. Semua tersaji rapi agar terbaca dan dapat mengedukasi masyarakat dalam rangka

menyukseskan penanggulangan pandemi covid-19.

Tujuan Pesan dalam Berkomunikasi

Seluruh pesan/ informasi dalam penanggulangan pandemi covid-19 semata untuk menciptakan sinergitas yang kuat antara berbagai pihak mulai dari kalangan internal di pemerintahan kota Tegal hingga kepada masyarakat luas. Kepatuhan pada aturan, dan menciptakan kesadaran diri untuk menjaga protokol kesehatan menjadi tujuan yang harus konsisten diwujudkan. Informasi telah berhasil menjangkau seluruh warga salah satunya dengan didirikannya posko terpadu penanggulangan covid-19 di setiap kecamatan. Koordinasi antar *leading sector* penanggulangan *covid-19* juga efektif. Misalnya pada Dinas Pendidikan, di setiap fasilitas pendidikan menerapkan prokes dan membagikan masker. Pada fasilitas publik seperti di pasar, bank, mall, rumah warga, bahkan rumah warga yang terpapar juga dipasang stiker untuk mencegah penyebaran lebih luas, memudahkan pengawasan isolasi mandiri. Dengan demikian seluruh sasaran dapat membaca dan memahami isi informasinya.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi komunikasi pemerintahan yang efektif telah membawa keberhasilan dalam penanggulangan pandemi covid-19 di Kota Tegal. Keefektifan strategi komunikasi terlihat dari optimalnya sinergi seluruh *leading sector* untuk bekerja dalam penanggulangan *covid-19*. Penelitian ini menunjukkan bahwa Walikota Tegal Dedy Yon telah memahami permasalahan yang terjadi dalam penanggulangan covid-19. Melalui media yang digunakan beliau mengomunikasikan berbagai informasi mulai dari tertulis, lisan hingga percepatan vaksinasi yang mencapai 100%. Isi pesan dalam proses komunikasi pemerintahan dari Walikota berhasil menciptakan kepatuhan

pada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan dalam aktivitasnya. Namun, proses penanggulangan covid-19 tetap saja tidak lepas dari berbagai hambatan seperti masih ditemukannya kasus pelanggaran perseorangan yang tidak memakai masker. Penulis memberikan masukan kepada Pemkot Tegal agar terus fokus dalam penanggulangan covid-19 mengingat kasus covid-19 bisa melonjak kapan saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M. (2022). *Capaian Vaksinasi Booster di Kota Tegal Sudah Hampir 5 Persen*. Pantura Post. <https://kumparan.com/panturapost/capaian-vaksinasi-booster-di-kota-tegal-sudah-hampir-5-persen-1xN76qPGH6U/1?msclkid=9340946ac06f11ec9f1540231cd552b4>
- Achmad, Fajar Bachruddin. (2021). *Pemkot Tegal Siapkan Rencana Kontinjensi Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19*. Tribun-Pantura.Com. <https://pantura.tribunnews.com/2021/06/15/pemkot-tegal-siapkan-rencana-kontinjensi-antisipasi-lonjakan-kasus-covid-19?msclkid=d12ff960c44711ec821110c4e1370095>
- Achmad, Fajar Bahruddin. (2021). *Evaluasi Penanganan Covid-19 di Kota Tegal, Sektor Pariwisata Jadi Sorotan*. Tribun Pantura.Com. <https://pantura.tribunnews.com/2021/05/19/evaluasi-penanganan-covid-19-di-kota-tegal-sektor-pariwisata-jadi-sorotan?msclkid=f8bbd0b3c07211ecb7291ec4f114855a>
- Agustino, L. (2020). Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19 : Pengalaman Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(2), 254. DOI 10.24.258/jba.v16i2.685
- Azizan bin Abdul Rahman, & Nurwati Ashikkin binti Ahmad Zaluki. (2020). Pencegahan Penularan Virus Corona (Covid-19) Menurut Perspektif Islam. *Journal of Fatwa Management and Research*, 22(1), 1–13. www.jfatwa.usim.edu.my. doi:10.33102/jfatwa.vol22no1.318 fatc at:sfmh4cdodjd4vg4yujjtdas2aq
- Cangara, H. (2013). *Perencanaan Komunikasi*. Rajagrafindo Persada.
- Dukcapil. (2021). *Jumlah Penduduk Semester 1 tahun 2021*. <https://disdukcapil.tegalkota.go.id/jumlah-penduduk-semester-i-tahun-2021>
- Hasan, E. (2005). *Komunikasi Pemerintahan*. Refika Aditama.
- Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Erlangga.
- Ismandianto, Syafri Harto, T. H. (2019). Model Komunikasi Pemerintahan Kota Tanjung Pinang dalam Pengembangan Wisata Pulau Penyengat Kepulauan Riau. *Naskah: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 18, 21–34. DOI : <https://doi.org/10.35967/jipn>
- Juliantari, N. K. (2019). Strategi Penyelamatan Muka melalui Kesantunan Berbahasa dalam Komunikasi Umat Hindu di Karangasem. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2, 1–9.
- Karlina Siregar, Y., & Djuwita, A. (2020). Strategi Komunikasi Bnn (Badan Narkotika Nasional) Jawa Barat Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Mahasiswa Kota Bandung. *Proceeding of Managment*, 7(1), 1895–1902. <https://jabar.sindonews.com/read/1737/1/sepekan-polrestabes-bandung-ungkap-8-kasus-kesehatan>, P. K. (2022). *Data Kasus Covid-19*. Kementerian Kesehatan. <https://data.covid19.go.id/public/index.html>
- Khairifa, B. R. S. F. (2018). Strategi Komunikasi Pemerintahan dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Desa Wisata Tuktuk

- Siadong Kabupaten Samosir. *Jurnal Darma Agung*, XXVI, 606–618. <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/70>
- Lianjani, A. (2018). *STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DALAM MENSOSIALISASIKAN PROGRAM SMART CITY* [UIN Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41377/1/APRILIA LIANJANI-FDK.pdf>
- Meitibellina, N., & Hariyanti, P. (2020). STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH KABUPATEN BLORA MENUJU SMART CITY. *Jurnal Komunikasi*, 15, 59–74. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vo115.iss1.art5>
- Nurfurqon, A. (2020). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19: Perspektif Hukum Administrasi. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 23, 14. <https://doi.org/10.24123/yustika.v23i01.2864>
- Praja, S. P. P. (2022). *Laporan Hasil Pelaksanaan Sidang Tindak Pidana Ringan Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 di Kota Tegal*.
- Purwanto, E. A. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Grava Media.
- Rindam Nasrudin, I. H. (2020). Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. *SALAM; Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7, 640. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15569>
- Safutra, I. (2020). *Alasan Wali Kota Tegal Terapkan Local Lockdown*. JawaPos.Com. <https://www.jawapos.com/nasional/27/03/2020/alasan-wali-kota-tegal-terapkan-local-lockdown/>
- Sameni, R. (2020). *Mathematical Modeling of Epidemic Diseases; A Case Study of the COVID-19 Coronavirus*. 1–19. <https://arxiv.org/pdf/2003.11371.pdf>
- Setiadi, T. (2021). *Ada 1.000 Gerai Vaksinasi, Ditargetkan 90 Persen Warga Tegal Divaksin dalam 3 Bulan*. Regional.Kompas.Com. <https://regional.kompas.com/read/2021/08/02/064127478/ada-1000-gerai-vaksinasi-ditargetkan-90-persen-warga-tegal-divaksin-dalam-3?msclkid=9099b185c06d11eca75806f90a496a8b>
- Tegal, D. K. K. (2020). *Apa itu Covid-19?* <https://corona.tegalkota.go.id/>
- Tegal, W. (2008). *PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TEGAL*.
- Tegal, W. (2020). *Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Covid-19 di Kota Tegal*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/164904/perda-kota-tegal-no-10-tahun-2020>
- Wijaya, I. S. (2015). PERENCANAAN DAN STRATEGI KOMUNIKASI DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN. *Lentera*, 18, 53–61. 195459-ID-perencanaan-dan-strategi-komunikasi-dala.pdf (neliti.com)
- World Health Organization. (2022). *WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard*. WHO (COVID-19) Homepage. <https://covid19.who.int/>